

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Maksimalkan Penyerapan Anggaran

JAKARTA – Banyak pembangunan di DKI Jakarta tidak tuntas pada tahun ini. Tidak rampungnya pembangunan akibat minimnya penyerapan anggaran pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Proyek yang tidak selesai di antaranya rumah susun sederhana sewa (rusunawa), gedung kesehatan, gedung pendidikan, *flyover*, *underpass*, dan kantor kelurahan.

Dari total APBD DKI 2017 sebesar Rp70,1 triliun, saat ini baru terserap 69%. Dengan sisa waktu satu pekan di tahun 2017, Pemprov DKI menargetkan penyerapan mencapai 86%.

"Lebih tinggi dari tahun lalu yang berkisar 82%. Mau percepatan bagaimana sisa waktu beberapa hari lagi. Kita *real* saja nggak usah mengada-ada," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefulah di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

"Pada tahun ini dari 69% digenjot menjadi 86% dalam waktu menghitung hari (tutup buku pada 20 Desember) sulit diwujudkan. Target realistis 75%."

NIRWONO JOGA

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti

Untuk hasil *real* penyerapan dan *mapping* pembangunan mana saja yang harus dilanjutkan akan diketahui pada 31 Desember mendatang. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan sudah memintanya menayangkan pembangunan apa dan siapa kontraktor yang belum menyelesaikan pembangunan sepanjang tahun ini.

"Perintah gubernur untuk perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya akan kita umumkan di website Pemprov DKI," katanya.

Target penyerapan anggaran hingga 86% pada akhir tahun dinilai sulit direalisasikan. Batas penutupan buku pada Rabu (20/12) diprediksi hanya bertambah sekitar 75% dari serapan anggaran saat ini 69%.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, penyerapan anggaran sejak 2015-2016 hanya berkisar 45%. Untuk mengongkrek penyerapan anggaran dimasukkan dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga penyerapan naik hingga 65-70%.

Penyerapan tersebut lebih besar terhadap belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, air, listrik, dan lainnya. Sementara belanja langsung seperti pembangunan infrastruktur lebih banyak menggunakan dana bantuan *corporate social responsibility* (CSR) dan Kompensasi Lantai Bangunan (KLB) yang banyak dilihat serta dirasakan masyarakat, seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), rusunawa, serta jembatan.

"Pada tahun ini dari 69% digenjot menjadi 86% dalam waktu menghitung hari (tutup

buku pada 20 Desember) sulit diwujudkan. Target realistis 75%," ujar Nirwono.

Menurut dia, pembangunan atau belanja langsung tidak akan berkelanjutan bila menggunakan dana CSR dan KLB. Sebab karena merasa tidak terlibat pemeliharaan dan perawatannya kerap diabaikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Apalagi banyak yang belum diserahkan menjadi aset DKI.

Dia menyarankan penggunaan dana KLB atau CSR dievaluasi sekaligus dimaksimalkan untuk kegiatan lain yang memang tidak terakomodasi anggaran dan menjadi pilihan terakhir. Kalau menggunakan APBD untuk pembangunan publik, SKPD merasa terlibat dan perawatannya berkelanjutan. "Lihat RPTRA dan CSR, ketika ada masalah mereka melen-pai tanggung jawab. Dinas Bina Marga membanggakan Simpang Susun Semanggi dengan KLB, dia tidak repot lelang. Tinggal duduk dan akhirnya punya DKI. Kalau ada masalah, dia lempar," ungkap Nirwono.

Adapun kebijakan yang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno agar tidak terulang rendahnya penyerapan anggaran, dia menyarankan tiga hal. *Pertama*, Anies-Sandi harus memastikan seluruh SKPD siap menghadapi *budgeting* dan tidak ada alasan mereka tidak siap. *Kedua*, perencanaan setiap perangkat daerah harus dipastikan matang dan lengkap secara administrasi sehingga mulai awal tahun sudah bisa lelang cepat.

"Lakukan evaluasi secara berkala, pantau, dan evaluasi. Penyalangan yang tidak selesai karena perencanaannya tidak matang," ucapnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil meminta Pem-

prov DKI jangan terbuai atau bangga dengan penyerapan anggaran sekitar 69%. Itu bisa dikatakan tinggi kalau sudah mencapai 80%.

Dia juga menayangkan serapan tinggi yang dibanggakan sekarang ternyata belanja tidak langsung mencapai 80%, tapi belanja langsungnya masih 50%. Artinya, mereka tidak maksimal menjalankan tugasnya. Karena itu, dia menyarankan Anies-Sandi mengevaluasi SKPD mana saja serapan anggarannya rendah. "Jangan langsung berpuas diri. Ini terjadi setiap tahun. Saya juga bingung kok happeda bangga dengan serapan 69%," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengevaluasi sistem penyerapan anggaran agar terserap maksimal. Penyerapan anggaran akan dinilai per kuartal. "Tidak bisa lagi dengan seperti cara sekarang, dimana penyerapan terkumpul pada minggu-minggu terakhir. Sebenarnya kita bisa kelola lebih awal dari per kloter, kita akan lakukan per kuartal. Insya Allah, kita bisa lebih tinggi lagi penyerapan tahun depan," ujar Anies.

Menurut dia, kegiatan anggaran itu dilakukan sepanjang tahun sehingga prestasi kinerja bukan hanya dari dinas, tetapi juga para pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan. Termasuk penagihan yang dilakukan hertahap sehingga tidak acuananya berkumpul di pengujung. "Kita akan panggil semuanya. Malah ini Pak Wabup juga ketemu pelaku dunia usaha yang juga berpengaruh pada serapan anggaran," katanya.

Si hima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBDAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Maksimalkan Penyerapan Anggaran

MEMBANGUN JAKARTA

APBD DKI Jakarta 2017 baru terserap sekitar 69% dari total Rp70,1 triliun. Di sisa waktu satu minggu ini, Pemprov DKI optimistis penyerapan mencapai 86%.



Penyebab penyerapan tak maksimal

- 1 Tidak efisienya lelang
- 2 Tidak tuntasnya pembangunan seperti rumah susun sederhana sewa (rusakawa), gedung kesehatan, gedung pendidikan, flyover, underpass, dan kantor kelurahan.



- 1 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp30,63 triliun meliputi Belanja Pegawai Rp20,17 triliun, Belanja Bunga Rp50,52 miliar, Belanja Subsidi Rp4,21 triliun, Belanja Hibah Rp1,75 triliun, Belanja Bantuan Sosial Rp1,07 triliun, Belanja Bantuan Keuangan Rp271,78 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp153,02 miliar.
- 2 Belanja Langsung sebesar Rp40,51 triliun

Pengeluaran pembiayaan: Rp5,94 triliun

- 1 Penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan
- 2 Penugasan beberapa proyek infrastruktur, khususnya sarana dan prasarana Asian Games 2018
- 3 Pembayaran utang pokok

Sumber: Pemprov DKI Jakarta/diolah dari berbagai sumber

BELASAN PROGRAM DAN PENDANAAN (Rp miliar)

